



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AL MUZZAMMIL YUSUF
2. Jabatan : ANGGOTA DPR RI
3. NHK : 35229

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.303.925.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 1.200 m2 di KAB / KOTA TANGGAMUS, Rp. 180.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 4.495 m2/300 m2 di KAB / KOTA TANGGAMUS, Rp. 337.125.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 133 m2/110 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
5. Tanah Seluas 5.744 m2 di KAB / KOTA TANGGAMUS, Rp. 430.800.000
6. Tanah Seluas 9.000 m2 di KAB / KOTA TANGGAMUS, Rp. 1.800.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/25 m2 di KAB / KOTA TANGGAMUS, Rp. 66.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 277 m2/85 m2 di KAB / KOTA TANGGAMUS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 20 m2/30 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, Rp. 540.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/215 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 222.500.000

1. MOTOR, SUZUKI SMASH SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.102.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.628.425.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.628.425.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.